



**Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan**

ISSN 2354-6147 EISSN 2476-9649

Tersedia online di: [journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah](http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah)

DOI: 10.21043/fikrah.v5i1.2145

## **Pesantren: Antara Transformasi Sosial Dan Upaya Kebangkitan Intelektualisme Islam**

**Moh. Toriqul Chaer**

*STIT Islamiyah Karya Pembangunan Paron, Ngawi, Indonesia*

*toriqul\_74@yahoo.com*

### **Abstrak**

Pesantren sebagai representasi pendidikan Islam yang khas di Indonesia memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Stigmatisasi pesantren sebagai pendidikan klasik yang konservatif dan jumud, nampaknya perlu dikaji ulang. Fungsi sosial pesantren masih diperlukan dengan menimbang ulang peran dan dinamika pesantren di masyarakat. Dinamika modernitas berimbas pada fungsi fundamental pesantren yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya reduksi identitas budaya pada pesantren. Kajian ini menggunakan metode *library research*. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa pesantren masih akan mampu mempertahankan diri sebagai institusi keagamaan Islam dan justru akan memperkuat tradisi dan bertransformasi di era modern. Kapasitas pesantren sebagai lembaga pendidikan dan sosial budaya dapat memainkan fungsi peran fundamental pada masyarakat Indonesia di tengah modernitas.

**Kata Kunci:** Pesantren, transformasi, tradisi

### Abstract

*Pesantren: Between Social Transformation And The Effort Of The Rise Of Islamic Intellectualism.* Pesantren as a representation of a typical Islamic education Indonesia has a significant contribution in the intellectual life of the nation. Stigmatization of the pesantren education as a classic conservative and old-fangled, seem to need to be re-examined.. Learn how social function of religious schools is still required with considering repeated the role and dynamics of the boarding school in the community. Dynamics of modernity imposes a fundamental function of the pesantren which eventually resulted in the emergence of the reduction of cultural identity on boarding. The problem is the consequences and implications logical, when pesantren connected with modernity. This article studies focused their efforts on Pesantren maintain themselves as Islamic religious institutions to strengthen the tradition and transformed in the modern era. In the capacity of the boarding school as educational institutions and social culture. It will play a fundamental role in the function of society Indonesia in the middle of modernity.

**Key Words:** Pesantren, transformation, tradition

### Pendahuluan

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa (Rofieq, 2004). Pesantren juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang unik, tidak karena keberadaannya yang sudah lama, tetapi karena kultur, metode dan jaringan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Karena keunikan tersebut, Geertz (1960) menyebutnya sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia. Terdapat beberapa hal yang tengah dihadapi pesantren dalam upaya pengembangannya, yaitu: *Pertama*, *image* pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tradisional, tidak modern, informal, dan bahkan teropinikan sebagai lembaga yang melahirkan terorisme, telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk meninggalkan dunia pesantren. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab sesegera mungkin oleh dunia pesantren dewasa ini.

*Kedua*, sarana dan prasarana penunjang yang terlihat masih kurang memadai. Bukan saja dari segi infrastruktur bangunan yang harus segera di benahi, melainkan terdapat pula yang masih kekurangan ruangan pondok (asrama) sebagai tempat menetapnya santri. Selama ini, kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaan tampak masih memerlukan tingkat penyadaran

dalam melaksanakan pola hidup yang bersih dan sehat yang didorong oleh penataan dan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai.

*Ketiga*, sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang keagamaan tidak dapat diragukan lagi, tetapi dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam bidang kehidupan sosial masyarakat, diperlukan perhatian yang serius. Penyediaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang manajemen kelembagaan, serta bidang-bidang yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, mesti menjadi pertimbangan pesantren. *Keempat*, meredupnya nilai-nilai budaya yang berkembang akibat gencarnya pemberitaan miring tentang dunia pesantren, maka perlu adanya dialog peradaban-kultural antara pesantren dengan masyarakat. Hal ini menjadi *urgen* pada saat ini dimana seharusnya pesantren mampu menjembatani jurang-jurang kegagapan transformasi, baik itu sosial, ekonomi serta yang tidak boleh dilupakan dalam bidang pendidikan di masyarakat. Kesemuanya tidak lain adanya romantisme sejarah bahwa pesantren mampu menjadi tumpuan bangsa ini dalam mencetak kader-kader intelektual-ulama bagi bangsa Indonesia.

Untuk menjadikan pesantren sebagai pusat peradaban bagi muslim Indonesia, pemahaman terhadap revitalisasi pesantren tidak hanya mencakup masjid, kiai dan santri, tetapi juga menyangkut kurikulum dan pendidikan serta budaya yang tumbuh dan berkembang di pesantren. Kajian ini juga akan memotret sejauh mana potensi pesantren berperan dalam transformasi sosial sebagai upaya membangkitkan kembali intelektualisme islam tanpa menghilangkan keaslian tradisi yang dimiliki pesantren.

### **Kajian Pustaka**

Berdasar penelusuran didapati penelitian tentang dunia pesantren, diantaranya adalah M. Shodiq (2011) mengkaji *Pesantren Dan Perubahan Sosial*. Hasil kajian mendapati setidaknya ada dua perubahan yang muncul dalam tradisi Pesantren. *Pertama*, dari perspektif sistem pendidikan, didapati bahwa pesantren tidak hanya mengajar intelektualisme Islam klasik, Pesantren telah juga mengajar ilmu-ilmu modern pada santri. *Kedua*, dari perspektif kepemimpinan, dalam hal ini Pesantren memiliki pemimpin unik yang disebut kiai. Kiai pesantren memegang peranan penting dalam

mengartikulasikan pesantren dengan dunia luar, termasuk bagaimana menjelaskan program-program pemerintah.

Suwadji (2014) meneliti tentang *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Pondok Pesantren*. Dalam ulasannya mengungkapkan kenyataan bahwa Pesantren sebagai lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam mendidik bangsa. Pesantren berpartisipasi berkaitan dengan pembangunan bangsa dalam pendidikan dan moral peserta didik. Adanya program berkelanjutan, berupa perbaikan terus-menerus dilakukan untuk sekolah, baik dari segi manajemen, akademik (kurikulum) dan fasilitas. Upaya ini merupakan usaha untuk mengikis pesantren dari kesan kuno dan tradisional yang selama menjadi stigma negatif yang melekat pada pesantren.

Muhammad Hasan (Hasan, 2015), tentang *Inovasi Dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren*. Kajian yang dilakukan berupaya mendeskripsikan dan memotret model inovasi dan modernisasi dalam konteks pendidikan Islam di pesantren. Kajian inovasi dan modernisasi pesantren menarik karena mengandung beberapa makna penting, *pertama*, kajian inovasi dan modernisasi pesantren merupakan kajian yang relevan dalam konteks keindonesiaan yang sedang melakukan proses pembangunan dan modernisasi; *kedua*, pesantren merupakan subkultur pendidikan Islam Indonesia sehingga dalam menghadapi inovasi dan modernisasi akan memberikan warna yang unik; *ketiga*, pendidikan pesantren merupakan *prototype* model pendidikan yang ideal bagi bangsa Indonesia. Dalam ulasanya menyimpulkan bahwa tema inovasi dan modernisasi terkait dengan perubahan sosial. Dalam konteks pesantren saat ini, setidaknya ada tiga aspek dalam modernisasi, inovasi, dan pembaruan pesantren, yaitu pada aspek metode, isi materi, dan manajemen pengelolaannya.

Kamin Sumardi (2012), mengkaji tentang *Potret Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Salafiah*. Berdasar hasil penelitian didapati bahwa pesantren salafiah sebagai lembaga pendidikan tersebar ke seluruh pelosok negeri. Kesederhanaan, kearifan lokal, falsafah dan pola pendidikannya sudah mengakar pada sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya dalam pendidikan berbasis agama Islam. Secara tidak langsung dan tidak formal pendidikan karakter telah ditanamkan secara kuat dengan pola dan teknik yang khas pesantren salafiah. Pendidikan karakter sesungguhnya tidak harus

menggunakan kurikulum yang formal, cukup dengan *hiden curriculum*. Pendidikan karakter tidak selalu diajarkan dalam kelas, namun dilakukan secara simultan dan berkelanjutan di dalam dan di luar kelas. Keberhasilan pendidikan karakter akan dipengaruhi oleh teladan dan contoh nyata dalam kehidupan dan dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan karakter tidak bisa dipaksakan, namun dijalani sebagai mana adanya kehidupan keseharian sehingga dengan sendirinya melekat kuat pada diri setiap peserta didik atau santri.

Mastuhu (1997, hal. 260) berpendapat bahwa upaya yang perlu dilakukan pesantren pada saat ini adalah memusatkan pada tiga variabel, yakni: materi, pandangan dunia, dan metodologi. Sholeh (1997, hal. 57) menambahkan bahwa upaya menghadapi tantangan akibat dari perubahan global pesantren dituntut memiliki tiga kemampuan yaitu *pertama*, kemampuan untuk *survive* (bertahan hidup) di tengah-tengah perubahan dan persaingan yang terus bergulir; *kedua*, kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya (rohaniah dan jasmaniyah); dan *ketiga*, kemampuan untuk berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Dengan pendekatan pola pikir *inklusivistik*, egaliter dan semangat untuk memperbaiki diri dalam menterjemahkan nilai-nilai *kompromi* kebudayaan tradisional dengan modern.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan yaitu buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen (Syaodih, 2009, hal. 52). Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sidat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dipahami dengan baik oleh pembaca.

## Pesantren sebagai Pusat Peradaban Muslim Indonesia

Peran penting kehadiran pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat muslim pada masa itu. Spirit pendirian pesantren lebih dikarenakan sebagai upaya pembebasan dari belenggu keterbelakangan pendidikan dan sosial ekonomi sekaligus juga dakwah untuk mensyi'arkan agama Islam. Hal ini menjadi gambaran bahwa pesantren merupakan pusat pembentukan moral dan keilmuan, pendidikan pesantren juga ikut menumbuhkan semangat persaudaraan dan solidaritas (*ukhuwah Islamiyah*).

Pesantren semakin berkembang dan jumlahnya mencapai ribuan. Sebagaimana dirilis [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), Kepala Pusat Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama H. Abdul Jamil mengatakan, jumlah santri pondok pesantren di 33 provinsi di seluruh Indonesia mencapai 3,65 juta yang tersebar di 25.000 pondok pesantren. Seperti halnya yang juga dijelaskan oleh Faisal Ismail (Ismail, 2004, hal. 96).

Ciri khas pesantren dalam perkembangannya memiliki perbedaan dengan praktek pendidikan pada institusi pendidikan lainnya dalam hal pembentukan karakter santri, dinamika pendidikan pesantren dan problematika di lingkup pesantren yang khas dan eksotik. Pesantren harus mampu menghidupkan fungsi-fungsi sebagai berikut, *pertama*, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*); *kedua*, pesantren sebagai lembaga yang melakukan kontrol social; *ketiga*, pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social-engineering*) atau perkembangan masyarakat (*community development*). Kesemuanya hanya bisa dilakukan jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi yang baik sekaligus mendesain kembali perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memberdayakan masyarakat menjadi *agent of change*.

Corak pesantren yang identik dengan kultur tradisionalisme, setidaknya harus dipahami dalam dua sisi yang berbeda. Pada sisi tradisionalisme mengacu kepada satu sistem ajaran yang berakar dari perkawinan konspiratif antara teologi *skolatisisme* Asy'ariyah dengan Maturidiyah dengan ajaran-ajaran tasawuf (misticisme Islam) yang

telah lama berkembang di Indonesia (Wahid, 1987). Sementara disisi yang lain tradisionalisme dalam metodologi pengajaran (pendidikan) yang diterapkan dalam dunia pesantren (*bacha-salafiyah*).

Penyebutan tradisional dalam konteks pengajaran dikarenakan dalam hal ini pola pengajarannya yang monologis, bukan pada dialogis-emansipatoris. Hal ini berarti dominasi dan peran kiai menjadi sangat dominan dalam mendoktrinasi para santri-santrinya dengan pendekatan pengajaran yang bersifat klasik seperti; *bandongan*, *sorogan*, *pasaran* dan lain sebagainya. Oleh karena itu tradisionalisme dalam dunia pesantren tidak perlu ditinggalkan, hanya saja perlu disinergikan dengan perkembangan dan modernitas zaman. Hal ini berangkat dari keyakinan masih perlunya keseimbangan antara keilmuan agama dan keilmuan umum serta yang paling penting adalah bagaimana mempersiapkan generasi-generasi yang mampu mengemban amanah sebagai seorang ulama-intelektual. Maka dari itu memadukan unsur-unsur tradisionalisme dan nilai-nilai modernitas dalam kehidupan pesantren menjadi suatu pilihan sejarah (*historical choice*) yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Terlepas dari adanya keterikatan tradisionalisme dalam dunia pesantren tidak selamanya stagnan dalam perkembangannya. Hal ini dikarenakan dalam prinsip pesantren adalah *al muhâfadzah 'ala al qadim al shalih, wa al akhdzu bi al jadid al ashlah*, yaitu tetap memegang tradisi yang positif, dan mengimbangi dengan mengambil hal-hal baru yang positif. Persoalan-persoalan yang berpautan dengan *civic values* akan bisa dibenahi melalui prinsip-prinsip yang dipegang pesantren selama ini dan tentunya dengan perombakan yang efektif, berdaya guna, serta mampu memberikan kesejajaran sebagai umat manusia (*al musawah bain al nas*).

Pesantren sebagai komunitas belajar keagamaan sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar yang menjadi wadah pelaksanaannya. Kehidupan keagamaan merupakan suatu bagian terpadu dari kenyataan sehari-hari dalam komunitas pedesaan tradisional. Pesantren menunjukkan diri sebagai lembaga yang menentukan watak ke-Islaman dari kerajaan-kerajaan Islam Jawa, dan memegang peranan penting penyebaran agama Islam sampai pelosok-pelosok Jawa. Di samping itu dari pesantren didapati pula

khazanah asal-usul sejumlah manuskrip tentang sistem pendidikan Islam di Jawa dan di Indonesia.

Madjid (1985) mengungkapkan bahwa secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna ke-Islaman, tetapi juga memuat makna keaslian (*indigenous*) Indonesia. Sebab cikal bakal lembaga yang dikenal pesantren dewasa ini sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Buddha, dan Islam tinggal meneruskan, melestarikan dan meng-Islamkan. Sebagai contoh adalah pembelajaran model pesantren ini, sudah ada dan lazim pada masa Hindu. Umat Hindu mengenal dengan Mandala. Mandala adalah sebutan bagi asrama para pertapa atau pelajar dari agama Siwa yang terletak di tengah-tengah hutan dan dipimpin oleh seorang dewa guru.

Pesantren bukan hanya sekedar fenomena lokal ke-Jawaan, akan tetapi merupakan fenomena yang juga terdapat di seluruh Nusantara. Bandingkan dengan pernyataan Clifford Geertz yang karena keunikannya menyebut pesantren sebagai sub-kultur masyarakat Indonesia (khususnya Jawa). Pada zaman penjajahan, pesantren menjadi basis perjuangan kaum nasionalis-pribumi. Banyak perlawanan terhadap kaum kolonial yang berbasis pada dunia pesantren. Pesantren sebagai tempat pendidikan agama memiliki basis sosial yang jelas, karena keberadaannya menyatu dengan masyarakat. Pada umumnya, pesantren hidup dari, oleh, dan untuk masyarakat. Visi ini menuntut adanya peran dan fungsi pondok pesantren yang sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang terus berkembang. Sementara itu, sebagai suatu komunitas, pesantren dapat berperan menjadi penggerak bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat pesantren merupakan kekuatan sosial yang jumlahnya cukup besar. Secara umum, akumulasi tata nilai dan kehidupan spiritual Islam di pondok pesantren pada dasarnya adalah lembaga *tafaqquh fid din* yang mengemban untuk meneruskan risalah Nabi Muhammad SAW sekaligus melestarikan ajaran Islam.

Sebagai lembaga, pesantren juga dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman dengan titik berat pada pendidikan. Pesantren juga berusaha untuk mendidik para santri yang belajar pada pesantren tersebut yang diharapkan dapat menjadi orang-orang yang mendalam pengetahuan keislamannya. Kemudian, mereka dapat



mengajarkannya kepada masyarakat, di mana para santri kembali setelah selesai menamatkan pelajarannya di pesantren. Lembaga pendidikan sejenis pesantren dapat ditemukan pula di luar pulau Jawa. Di Aceh disebut dengan *dayah*, di Minangkabau ia dinamakan *surau*. Berbagai penelitian terungkap bahwa pada awal abad ke-16 pesantren merupakan pusat lembaga pendidikan Islam kedua setelah masjid (Bruinessen, 1995: 24).

### Kiai dan Transformasi Sosial

Kedudukan para kiai di pesantren bukanlah sekedar memberikan pelajaran, pembimbing keagamaan bagi santri-santrinya akan tetapi juga berperan sebagai tokoh non-formal yang ucapan-ucapan pesantren. Pendek kata para kiai berperan sebagai sosok, model atau contoh yang baik (*uswatun hasanah*) tidak saja bagi santri, akan tetapi juga bagi seluruh komunitas di sekitar pesantren.

Clifford Geertz (Geertz, 1960) mengemukakan bahwa kiai selain berperan sebagai tokoh masyarakat yang memberikan pelayanan sosial, mereka juga berperan sebagai mediator atas arus informasi yang masuk ke lingkungan santri. Para kiai inilah yang mentransformasikan nilai-nilai yang mereka anggap baik dan berguna kepada santri dan komunitas dilingkungan mereka dan menolak atau membuang nilai-nilai yang dianggap kurang/tidak baik bagi mereka. Lebih lanjut Geertz beranggapan bahwa kiai sebagai figur penyaring berbagai informasi yang datang dari luar yang masuk pada kehidupan kaum santri dengan mengambil yang berguna, membuang yang tidak bermanfaat. Inilah alasan mengapa Geertz menempatkan kiai sebagai makelar budaya (Ismail, 2004). Peran *cultural broker* ini akan macet, manakala arus informasi yang demikian keras masuk kedalam kehidupan masyarakat dan posisi kiai tidak dapat lagi membendung arus budaya atau informasi yang masuk. Dari kemacetan fungsional peran kiai timbul adanya kesenjangan budaya (*cultural lag*) antara kiai dengan komunitas masyarakatnya, dan tidak jarang kiai ditinggalkan oleh penganutnya atau santrinya (Wahid, 1987).

Horikhosi dalam Nur Syam (2005) berpendapat tentang kiai dan perubahan sosial, tentang fungsi dan peran kiai sebagai mediator. Menurutnya kiai dapat menjadi penghubung di antara kepentingan atasan dan bawahan, karena kiai memiliki

kemampuan untuk memahami dunia kaum bawahan dan dunia kaum atasan. Kiai memiliki kemampuan individual untuk melakukan perubahan sosial terhadap pandangan hidup tradisional ke arah pandangan hidup modern dengan watak emansipatoris. Kiai dengan kharismanya menjadi mediator di tengah kesulitan yang dihadapi masyarakat. Perubahan peran kiai bisa saja terjadi di dalam menghadapi ummat/masyarakat. Peran kiai yang semula sentral kemudian memudar, terutama dalam bidang sosial-politik. Jika dulunya kiai berperan didalam seluruh kehidupan masyarakat maka seiring dengan perubahan zaman, peran itu berubah menjadi untuk urusan *ukhrawi* saja. Banyak terjadi perbedaan afiliasi politik antara kiai dengan penganutnya. Jadi kiai tidak sakral dan dominan lagi dalam menentukan perilaku politik masyarakat.

Hiroko berdasar hasil penelitiannya di beberapa pesantren di Indonesia menyatakan bahwa *pertama*, para kiai tidak bersikap meredam terhadap perubahan yang terjadi, akan tetapi mereka justru memelopori perubahan sosial dengan cara mereka sendiri. *Kedua*, para kiai bukan melakukan penyaringan informasi, melainkan menawarkan agenda perubahan yang mereka anggap sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang mereka pimpin. *Ketiga*, para kiai bukannya kurang berperan (karena menunda datangnya perubahan melalui proses penyaringan informasi), akan tetapi mereka berperan sepenuhnya karena mereka mengerti bahwa perubahan sosial merupakan perkembangan yang tak terelakkan (Horikoshi, 1986). Dapat dipahami bahwa figur kiai menentukan hitam-putihnya lembaga pendidikan Islam/pesantren yang ia pimpin. Kiai berperan aktif dalam mewujudkan tatanan baru yang dapat dijadikan pijakan hidup dan kehidupan masyarakat pada zaman modern ini tanpa dengan meninggalkan ciri khas/karakteristik Islam sebagai sebuah pedoman hidup dan kehidupan. Dengan kata lain perubahan yang terjadi di lingkungan pesantren tidak bisa dilepaskan begitu saja dari adanya keterkaitan dan peran-serta kiai di dalamnya (Muhajir, 1984, hal. 11-12). Peranan para kiai dan ulama sebagai tokoh masyarakat dapat dilihat, misalnya dari serangkaian upaya-upaya mereka untuk menyukseskan program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kiai dan ulama berperan sebagai penerjemah dan komunikator yang menterjemahkan ide dan gagasan program-program pembangunan kedalam bahasa

agama yang mudah dimengerti kepada komunitas yang mereka pimpin. Dengan cara ini, para kiai dan ulama berperan dalam memobilisasi masyarakat muslim lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam program-program yang dilakukan pemerintah. Hal ini semakin mempertegas jelas peran kiai dan ulama dalam proses transformasi sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan.

Ismail (2004, hal. 13) berpendapat bahwa pada era saat ini, peran pesantren tak dapat diabaikan dan dilihat sebelah mata. Dilihat dari perspektif transformasi sosial budaya, pesantren berperan sebagai *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of modernization*. Hal ini dikarenakan pesantren sebagai manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam mengatur bukan hanya amalan-amalan peribadatan, apalagi sekedar hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga perilaku orang dalam berhubungan dengan sesama manusia dan dunianya.

Banyak ragam contoh keberhasilan sebuah program yang digulirkan pemerintah karena keikutsertaan peranan kiai dan ulama. Hal ini nampak jelas pada program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi yang pada awalnya mendapat tanggapan yang cukup reaksioner dari masyarakat akan tetapi lambat-laun berkat seruan, himbauan para kiai program tersebut pada akhirnya dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Proses sosialisasi dan pelaksanaan program pemerintah, peranan kiai dan ulama sangat strategis menjembatani *gap* sosialisasi informasi program antara masyarakat dengan pemerintah. Atas dasar inilah, sudah seharusnya komitmen untuk menjadi mitra yang sejajar dapat diwujudkan diantara pemerintah dengan para kiai/ulama. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah ke-Indonesian nampak dan terjadi *miss-macth* antara kiai, ulama dengan pemerintah.

### *Menggagas Format Idealisme Pendidikan Pesantren*

Dinamika sistem pendidikan pesantren adalah pergeseran, perubahan dan perkembangannya pesantren sesuai dengan perkembangan zaman. Kualitas dari sistem pendidikan pesantren tergantung pada kualitas kiai sebagai aktor sosial, mediator, dinamisator, katalisator, motivator maupun sebagai kekuatan sebuah pesantren dengan kedalaman ilmu dan wawasannya. Diharapkan nantinya pesantren mampu berperan

dan mengantisipasi serta menjawab problematika masyarakat (keummatan) pada setiap aspek sesuai dengan bidang kebutuhan masyarakat (Nasir, 2005, hal. 7).

Pesantren dipahami sebagai komunitas yang terdapat di dalamnya yaitu *pertama*, Kiai sebagai seseorang yang mengajar dan mendidik, *kedua*, Santri sebagai seseorang yang belajar dari kiai, *ketiga*, Masjid sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, shalat berjamaah dan sebagainya, *keempat*, Pondok atau asrama yang merupakan tempat tinggal para santri.

Dhofier (Dhofier, 1994) menyebut pesantren dengan dua ciri, yaitu ciri umum yang menandai sebuah pesantren adalah adanya *pertama*, Kiai (*abuya, encik, ajengan* dan tuan guru), sebagai figur sentral yang biasanya juga sebagai pemilik pondok pesantren, *kedua*, Asrama, sebagai tempat tinggal santri, *ketiga*, Adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian (*weton, bandongan dan sorogan*). Sedangkan ciri khususnya ditandai dengan adanya sifat yang karismatik dan suasana kehidupan keagamaan yang mendalam.

Penelitian Arifin (1993) menjelaskan bahwa dunia pesantren saat ini sudah terjadi tren pergeseran gaya kepemimpinan dan manajemen secara massif dalam rangka adaptasi dengan perubahan realitas sosial yang cepat. Alam pikiran pesantren yang dibentuk oleh komunitas agraris perlahan-lahan tapi pasti bergeser ke dalam alam pikiran industri, di mana aspek manajemen dan profesionalitas yang diabaikan dalam pikiran agraris mendadak menjadi penting dalam proses pertumbuhan pesantren.

Maulani (2016, hal. 171–173) berpendapat bahwa ada empat hal langkah yang perlu dipertimbangkan demi kemajuan pesantren di masa mendatang antara lain *pertama*, soal kepemimpinan. Sentralistik kepemimpinan pesantren yang berpusat pada kyai merupakan ciri khas pesantren yang tidak tepat jika dihilangkan. Oleh karena itu, pembaharuan pada aspek kepemimpinan dapat dilakukan pada penataan manajemen pesantren dan persiapan pada kader pengurus pesantren. Cara demikian perlu ditempuh untuk menjaga keberlangsungan pesantren dengan seluruh modal besar yang dimiliki dapat terus dijaga terutama ketika sang kyai meninggal dunia.

*Kedua*, pembenahan pada bidang metodologi. Pesantren memiliki tradisi yang sangat kuat di bidang transmisi keilmuan klasik yang perlu improvisasi di bidang

metodologi. Santri sering menganggap ilmu sebagai sesuatu yang bulat dan tidak dapat ditambah lagi. Maulani berpendapat perlu adanya proses kreatif yang harus ditumbuhkan di pesantren dalam rangka pengkayaan pengetahuan dan juga ijtihad ilmu pengetahuan.

*Ketiga*, pesantren harus mampu memposisikan dirinya di tengah realitas sosial. Pesantren dituntut harus melakukan reorientasi terhadap peran-peran pendidikan, keagamaan dan peran sosial di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, pesantren dituntut harus mampu memperluas jaringan antar pesantren dan mampu menjadi mitra bagi stakeholder lain.

Mukti Ali (1971) berpendapat bahwa pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu maka fokus sasaran pembentukan mental para santri menjadi prioritas utama dengan mental membangun. Adapun ciri-ciri mental membangun adalah: (1) Sikap terbuka, kritis, suka menyelidiki, bukan mentalitas mudah menerima tradisi, takhayul atau otoritas modern sekalipun, disamping itu juga tidak anti-kritik; (2) Melihat ke depan (visioner); (3) Lebih sabar, teliti dan lebih tahan bekerja; (4) Mempunyai inisiatif dalam menggunakan metode baru; (4) Bersedia bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang lebih modern, misalnya koperasi, perbankan dan lainnya.

Proses pembentukan mental santri berkaitan dengan kurikulum pondok pesantren. Sebagian sistem pendidikan dan pengajaran pesantren sampai saat ini, lebih banyak ditekankan kepada agama, mental dan intelektual. Pendidikan vokasional, atau pendidikan yang bersentuhan dengan menumbuh-kembangkan kemampuan bakat dan keterampilan di lingkungan pesantren belum mendapat tempat yang layak. Oleh karena itu perlu adanya pelajaran-pelajaran yang bisa menumbuh-kembangkan bakat dan minat peserta didik (santriwan/santriwati), sehingga nantinya bisa diharapkan dari pesantren lahir individu intelektual-ulama, juga para wirausahawan yang siap dan mampu bersaing dalam dunia usaha dan tenaga kerja.

Akibat dari mengesampingkan keterampilan kerja –pendidikan vokasional- dan hanya mengutamakan pendidikan dan pengajaran mental dan intelektual, maka

pendidikan menimbulkan hal-hal sebagai berikut : pertama, menimbulkan intelektualisme, membanggakan kecerdasan intelektual, kurang menghargai kerja tangan yang dianggap sebagai kerja kasar karena mengotori tangan; kedua, menimbulkan priyayi-isme yakni keinginan untuk menjadi pegawai dan enggan bekerja sendiri; ketiga, terlalu mementingkan ijazah, sehingga kadang-kadang berusaha untuk memperoleh ijazah dengan jalan yang tidak wajar; keempat, untuk menjadi “pegawai negeri”, sehingga madrasah dalam pondok pesantren minta dilegalisasi-diakui- dan disamakan atau “dinegerikan”. Ini adalah semangat “etatisme”, suatu anggapan bahwa segala sesuatu itu harus diatur oleh pemerintah, termasuk juga bidang pendidikan.

Keberhasilan akan keberlangsungan pesantren juga dipengaruhi oleh sejauh mana nilai-nilai hidup dipelihara dan ditanamkan pesantren pada santrinya. Salah satu nilai hidup yang mempengaruhi keberhasilan keberlangsungan pesantren adalah kemandirian (Solichin, 2012, hal. 188–189). Format idealisme pendidikan pesantren yang berdasarkan nilai kemandirian perlu didorong dan didisain kembali agar dapat disesuaikan dengan era modern. Pesantren yang memiliki kemandirian dan kekuatan ekonomi internal mampu tetap eksis dan membiayai penyelenggaraan pendidikannya sekaligus mampu mengembangkan keterampilan serta membangun mental para santri menjadi para wirausahawan.

Di samping itu dikotomi pengetahuan yang tumbuh subur dan berkembang dalam dunia pesantren –terutama yang bercorak salafiyah- yaitu perbedaan kelas antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu Islam. Selama ini dalam khazanah dunia intelektual Islam sering dijangkiti oleh virus “stigma ilmu umum dari Barat yang sekuler”, sehingga pada akhirnya kecenderungan (milieu) untuk mempelajari ilmu-ilmu umum menjadi melemah dikalangan umat Islam. Sejatinya kesetaraan dalam perlakuan kedua ilmu tersebut sudah tentu akan mendatangkan studi komparatif (perbandingan) yang positif bagi kedua belah pihak, yakni ilmu umum –yang diyakini berasal- dari dunia Barat dan ilmu-ilmu keislaman yang datang dari Dunia Timur (Islam) bisa saling mengisi dan melengkapi.

Perpaduan antara ilmu-ilmu keislaman (Islamic sciences) dengan ilmu-ilmu umum (modern sciences) dinamakan dengan pendekatan integrative-interkoneksi yang

mencakup tiga dimensi pengembangan ilmu, yakni hadlarah al-nas, hadlarah al-‘ilm dan hadlarah al-falsafah yang bertujuan untuk menghadirkan sebuah kesatuan ilmu yang intergratif dan interkonektif.

Perpaduan antara ilmu –ilmu keislaman (Islamic sciences) dengan ilmu-ilmu umum (modern sciences) dinamakan dengan pendekatan integrative-interkonektif yang mencakup tiga dimensi pengembangan ilmu, yakni hadlarah al-nas, hadlarah al-‘ilm dan hadlarah al-falsafah yang bertujuan untuk menghadirkan sebuah kesatuan ilmu yang intergratif dan interkonektif. Sehingga nantinya bisa diharapkan menjadi solusi dari berbagai krisis yang diakibatkan oleh ketidak-pedulian suatu ilmu terhadap ilmu yang lain yang selama ini terjadi, baik dalam kalangan pendidikan Islam maupun pendidikan pada umumnya.

Pendekatan keilmuan baru yang terpadu, yang memadukan wahyu Tuhan dengan temuan pikiran manusia ini (ilmu-ilmu integratif-interkonektif), tidak akan berakibat mengecilkan peran Tuhan (sekularisasi) atau mengucilkan manusia sehingga teralienasi dari dirinya sendiri, masyarakat serta lingkungan hidupnya. Sebaliknya konsep re-integrasi epistemologi keilmuan ini sekaligus akan dapat menyelesaikan konflik antara sekularisme ekstrim dan fundamentalisme negatif dari paham-paham yang rigid dan radikal.

Interkoneksi dan integrasi keilmuan dapat berwujud dalam beberapa model atau sifat. Dibandingkan dengan integrasi model interkoneksi keilmuan lebih memungkinkan dan lebih mudah untuk diterapkan dalam wilayah atau level materi metodologi. Model kajian interkoneksi misalnya, dapat bersifat informatif, konfirmatif dan korektif. Bastaman (2001: 33) (tidak ditemukan referensi) menawarkan beberapa pola pemikiran “dialektika agama dan sains”, mulai dari yang paling superfisial sampai bentuk yang agak mendasar, yaitu similarisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi dan verifikasi (Abullah, 2012).

Pendidikan pondok pesantren sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional memiliki 3 unsur utama yaitu: 1) Kiai sebagai pendidik sekaligus pemilik pondok dan para santri; 2) Kurikulum pondok pesantren; dan 3) Sarana peribadatan dan pendidikan, seperti masjid, rumah kiai, dan pondok, serta sebagian madrasah dan

bengkel-bengkel kerja keterampilan. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh mayoritas masyarakat muslim, hal ini dikarenakan kelahiran undang-undang ini masih amat belia dan belum sebanding dengan usia perkembangan pesantren di Indonesia. Keistimewaan pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasal-pasal dalam Undang-undang Sisdiknas sebagai berikut:

Pasal 3 UU Sistik Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan diimplementasikan di pesantren. Perjalanan sejarah pesantren sudah sejak lama menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Tidak hanya itu, keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang didirikan atas peran serta masyarakat, telah mendapatkan legitimasi dalam undang-undang Sisdiknas.

Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Masyarakat pada Pasal 8 menegaskan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan ini berarti menjamin eksistensi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini dipertegas lagi oleh Pasal 15 tentang jenis pendidikan yang menyatakan bahwa Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren adalah salah satu jenis pendidikan yang memang selama ini concern di bidang keagamaan.



Secara khusus, ketentuan tentang pendidikan keagamaan ini dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang Sisdiknas yang menegaskan: (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama; (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan bentuk lain yang sejenis. Lebih jauh lagi, saat ini pesantren tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan keagamaan semata. Namun, dalam perkembangannya ternyata banyak juga pesantren yang berfungsi sebagai sarana pendidikan nonformal, dimana para santrinya dibimbing dan dididik untuk memiliki skill dan keterampilan atau kecakapan hidup sesuai dengan bakat para santrinya.

Keberadaan pesantren sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam pendidikan juga mendapat penguatan dari UU Sisdiknas. Pasal 54 menjelaskan: (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Bahkan, pesantren sebagai Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM) diakui keberadaannya dan dijamin pendanaannya oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Pasal 55 yang menegaskan: (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat; (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan; (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat

memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan format idealisme pendidikan pondok pesantren juga perlu diawali dengan pelaksanaan evaluasi. Evaluasi pengelolaan pondok pesantren sangat penting dilakukan untuk memperoleh satu kriteria tentang mekanisme pengelolaan pondok pesantren yang memiliki standar (Khuriyah, Zamroni, & Sumarno, 2016, hal. 58). Salah satu model evaluasi yang dapat digunakan sebagai evaluasi pengelolaan pesantren adalah kombinasi dari model evaluasi CIPP dan model *goal free evaluation*, dengan alasan pertama, model CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan program yang berjalan di pondok pesantren. Kedua, *model goal free evaluation* merupakan sebuah model evaluasi yang bertujuan untuk membuktikan keberlangsungan program. Ketiga, melalui model *goal free evaluation*, data yang diperoleh evaluator dapat dijadikan sebagai pelengkap dari data yang diambil menggunakan model lain. Kombinasi dua model tersebut oleh Khuriyah (Khuriyah et al., 2016) pernah diterapkan pada Pondok Pesantren Al Falah Sidoharjo Sragen, Pondok Pesantren Assalaam, dan Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta. Pondok pesantren harus memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi pengelolaan pondok pesantren. Model evaluasi pengelolaan pondok pesantren akan sangat baik digunakan oleh setiap pondok pesantren agar kualitas pesantren semakin meningkat dan semakin dipertimbangkan keberadaannya sebagai salah satu pendidikan mental terbaik di Indonesia.

### **Pesantren dan Spirit Kebangkitan Intelektual**

*“Now, even though the realms of religion and science in themselves are clearly marked off from each other, nevertheless there exist between the two strong reciprocal relationships and dependencies. Though religion science, in the broadest sense, what means will contribute to the attainment of goals it has set up. But science can only be created by those who are thoroughly imbued with the aspiration toward truth and understanding. This source of feeling however, springs from the sphere of religion. To this there also belongs the faith in the possibility that the regulation valid for the world of existence are rational, that is, comprehensible to reason. I cannot conceive of a genuine scientist without that profound faith. The situation may be expressed by an image : Science*

*without religion is lame, religion without science is blind.*" (Widjaja & Swasono, 1983, hal. 53).

Ungkapan Albert Einstein dalam *Out of My Leter Years* di atas nyata bahwa ilmu tidak semata-mata untuk sekedar tahu, hanya untuk memuaskan keinginan akan pengetahuan. Ilmu dituntut guna keselamatan dan perbaikan kualitas hidup manusia di atas dunia ini. Sebagai anggota masyarakat orang yang berilmu bertanggungjawab, bertanggungjawab terhadap baik dan buruk keadaan masyarakatnya.

Islam sebagai agama, ia tak dapat langsung memberi isi kepada ilmu, akan tetapi sumbangan Islam kepada ilmu terdapat pada anjuran-anjurannya, kewajiban bagi para penganutnya untuk mempelajari ilmu sebanyak-banyaknya dimana saja, dari siapa saja. Umat Islam diharuskan menuntut kemuliaan hidup dan pengetahuan. Itulah sebabnya maka diharuskan untuk menuntut ilmu, tentang agama, tempat orang menuntut ilmu tidak menjadi soal, yang diperhatikan hanya hikmah dan kepandaiannya. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*al-hikmatu dhâlatul mukmini fahaisu wajadaha fahua ahaqû biha*" ( hikmat itu barang mukminin, dimana saja ia dapati, ialah yang paling patut menjemputnya).

Sejarah Islam membuktikan, bahwa berabad-abad lamanya Islam menjadi pendorong atas persebaran ilmu. Ilmuwan Islam dahulu kala menghidupkan kembali ilmu-ilmu Yunani yang telah terpendam di zaman Tengah dan menyebarkannya ke Eropa melalui Asia Minor (Asia Kecil), Afrika Utara dan Spanyol. Bukti sejarah ini yang membuktikan bahwa Islam selalu dan senantiasa menganjurkan penganutnya untuk selalu *welcome and update* dengan keilmuan. Islam juga mengajarkan persaudaraan, karena adanya keyakinan dengan persaudaraan (*ukhuwah*) maka bisa tercipta suatu kondisi masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera (Widjaja & Swasono, 1983).

Pesantren sebagai salah satu unsur lembaga pendidikan di Indonesia, sangat erat secara historis dengan perkembangan kebangsaan Indonesia dan juga erat hubungannya dengan sejarah pemikiran-pemikiran keagamaan –khususnya Islam- di Indonesia. Pesantren yang pada awal perkembangannya masih bercorak *salaf* (tradisional), lambat-laun mulai bermetamorfosis menjadi lembaga-lembaga pendidikan modern menggunakan studi komparatif dengan mengombinasikan antara keilmuan agama

dengan keilmuan umum, yaitu perpaduan antara ilmu –ilmu keislaman (*Islamic sciences*) dengan ilmu-ilmu umum (*modern sciences*) dinamakan dengan pendekatan *integrative-interkonektif*.

Kelembagaan Islam yang *diversifikatif* nampak jelas adanya dua tekanan pendidikan yang berbeda antara usaha mengembangkan watak kesalehan individual dan usaha intelektualisasi keislaman. Biasanya usaha yang pertama tercermin pada proses pendidikan agama di sekolah dan madrasah tingkat dasar dan menengah. Menanamkan watak kesalehan lebih ditekankan kepada anak didik di kedua lembaga tersebut karena adanya orientasi pencapaian keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini kemudian direspon oleh sejumlah sekolah yang mengusahakan penciptaan suasana keberagaman dalam lingkungan pergaulan anak didiknya. Dengan demikian dalam kenyataan yang diversifikasi pun masih ada titik temu orientasi antar lembaga pendidikan dalam bidang yang universal.

Adapun usaha intelektualisasi keislaman dapat dicermati pada level perguruan tinggi. Pada level ini nampak adanya kecenderungan pendidikan Islam yang ditekankan pada aspek upaya pengkajian dan pemahaman Islam yang dinamis dengan tanpa meninggalkan kajian analisa historis-kritis terhadap pemikiran Islam yang telah berkembang dari abad ke abad. Proses ini berpengaruh pada cara pandang keduniaan umat Islam yang lebih luas karena mereka dapat membebaskan diri dari pemahaman-pemahaman keagamaan yang sempit dan doktrinal. Tidak heran jika dalam kenyataannya, perkembangan Islam di Indonesia sangat mudah merespons kecenderungan-kecenderungan kontemporer yang lebih positif bagi kemajuan peradaban umat manusia, seperti halnya isu-isu demokratisasi, hak-hak manusia, diskursus masyarakat madani (*civil society*), keadilan dan kesetaraan gender (Rahim, 2001).

Nurcholish Madjid dalam Ismail (Ismail, 2004) memberikan deskripsi tentang *starting-point* perkembangan intelektual Muslim yang dibangun sejak tahun 1970an dan diperkirakan pada tahun 2006 akan mulai gelombang kebangkitan intelektual muslim kedua yang dipelopori oleh Muslim tradisional. Pada era tahun 1970an anak-anak dikalangan muslim tradisional sudah banyak yang memasuki dunia perguruan tinggi,

tidak saja universitas-universitas dalam negeri tetapi juga universitas-universitas luar negeri. Hal ini semakin memperkuat anggapan bahwa kekuatan pesantren lahir dari adanya kultur budaya pedesaan yang berkembang secara unik bersinergi dengan kekuatan dan kharisma intelektual-ulama kiai menjadikan pesantren sebagai representasi dari romantisme peradaban Islam.

Para pakar berpendapat, bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa dan masyarakat dapat dilihat dari bobot kualitas pendidikan yang diselenggarakan bangsa dan masyarakat tadi. Sedangkan taraf analisa intelektual suatu bangsa dapat diamati dari mutu pendidikan bangsa tersebut. Kecanggihan ilmu dan teknologi suatu bangsa dapat diukur dari mutu dan kualitas pendidikan bangsa yang bersangkutan, ini menunjukkan korelasi yang signifikan antara mutu pendidikan suatu bangsa dengan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki.

Fenomena perkembangan ini terus meningkat pada dekade abad ke-21 dan kurun waktu selanjutnya kedepan, ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di kalangan muslim tradisional mengalami peningkatan dan percepatan secara gradual, drastis dan radikal sejalan dengan gerak dan laju transformasi sosial budaya yang terjadi. Iqbal mengatakan: *“Islam is neither nationalism nor imperialism but league of nations, which recognized artificial boundaries and racial distinctions for facility of reference only, and not for restricting the social horizon of its members”*. Orang Islam melakukan tiap-tiap perbuatan karena Allah SWT. Demikian juga hendaknya dalam diri seorang muslim ditanamkan semangat *mardhatillah* dalam menuntut ilmu. Ilmu menuntut pengorbanan dalam diri kita (*self-sacrifice*), karena hanya dengan pengorbanan tersebut ilmu mencapai kemajuan.

Komunitas santri pesantren, mengalami peningkatan dan pemekaran Sumber Daya Manusia berimbas pada peningkatan dan percepatan kualitas pada diri mereka. Percepatan proses gelombang kebangkitan intelektual di kalangan pesantren sebagai pelopor dan penggerak kebangkitan intelektual muslim kedua di Indonesia menjadi kenyataan sejarah yang berulang sebagaimana disitir oleh Nurcholish Madjid.

Pesantren memang sudah sepiantasnya melahirkan para generasi intelektual muslim terbaik bangsa. Diterapkannya pola *madrasiyyah* atau sekolah sebagaimana pola sekolah-sekolah di Eropa tidak banyak mengubah citranya sebagai lembaga yang memang kental melahirkan intelektual muslim. Bahwi (2012, hal. 144) menyebut bahwa diterapkannya sistem madrasah di pondok pesantren tak lebih merupakan arus balik dari sejarah pendidikan Islam masa silam, di mana sistem madrasah sudah diterapkan jauh sebelum Islam menyebar di Indonesia, seperti madrasah Nidzamiyah di Baghdad yang pernah dikepalai oleh AL-Ghazali. Sayyed Hussein Nasr sebagaimana dikutip Bahwi (2012, hal. 145) juga mengatakan bahwa pesantren pada dasarnya merupakan sebuah sistem pendidikan tradisional yang mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan oleh para ulama dari masa ke masa tidak terbatas pada periode tertentu dalam sejarah Islam.

Perbedaan pola pendidikan pesantren di Indonesia dengan *Hauzah* atau pendidikan tradisional (pesantren) di Iran adalah terletak pada kontruk budaya dibangun. Kontruk budaya pesantren masih begitu menekankan penghormatan setinggi-tingginya kepada kiai dan para guru, secara tak langsung telah membentuk kultur yang khas di lingkungan pesantren. Tidak jarang di lingkungann pesantren seringkali tercipta pengkultusan berlebihan terhadap seorang kiai yang terkadang sangat tidak rasional (Bahwi, 2012).

Dalam konteks perkembangan tradisi intelektual di Iran, sistem yang diterapkan di *hauzah* memungkinkan terjadinya proses dialektika intelektual yang menarik. Proses ini menuntut adanya keterbukaan serta pengembangan kurikulum yang tidak pasif. Meningkatnya intensitas dialketikal antara guru dan murid disertai keterbukaan ternyata mampu menciptakan suasana belajar yang aktif. Para siswa *hauzah* diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya, mendebat hingga mengkritisi gurunya atau mengkritisi pelajaran yang sedang diajarkan. Pola inilah yang menciptakan peluang bagi para siswa *hauzah* untuk mengaktualisasikan pemahamannya terhadap pelajaran yang sedang mereka kaji dan ini berlaku untuk semua jenis pelajaran termasuk pelajaran-pelajaran agama yang memang masih dianggap sakral (Bahwi, 2012).

## Simpulan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang secara historis merupakan lembaga tertua dalam bidang pendidikan keagamaan di Indonesia. Adaptasi pengajaran pesantren dalam beberapa kajian kesejarahan berasal dari tradisi pengajaran agama Hindu yang ditransformasikan dalam kultur dan budaya Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai kultur budaya yang kuat dalam menjaga nilai-nilai tradisi lama yang berkembang di masyarakat, inilah mengapa pesantren mampu bertahan (*struggle*) dan berkembang di masyarakat. Stereotip pesantren yang diidentikkan dengan hal-hal yang berbau kejumudan berpikir, eksklusif, puritan dan lain sebagainya, faktanya dalam sejarah kebangkitan intelektual Islam tercatat sumbangsih besar hasil pendidikan *tradisionalisme* pesantren. Ini membuktikan bahwa pesantren baik yang bercorak salaf, khalaf dan semi modern sekalipun selalu mempunyai karakteristik yang khas untuk selalu *up-date* mengikuti perkembangan zaman.

Sebagai salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, pesantren mempunyai daya *resistensi* terhadap perkembangan zaman. Hal ini terbukti lembaga pesantren hingga kini masih tetap eksis, yang tak mungkin dipisahkan dari *eksistensi* (keberadaan) pesantren karena adanya daya kharismatik kiai yang memimpin pesantren. Dalam kultur budaya ke-Indonesiaan masyarakat Indonesia yang pada umumnya bersifat *paternalistik* sangat menghargai sosok atau figur pelindung, pengayom, pengasuh yang mampu memberikan solusi-solusi -bahkan yang alternatif sekalipun- atas permasalahan yang ada di masyarakat. Sosok atau figur ini terepresentasikan dengan ideal pada sosok kiai yang selama ini mereka yakini juga mempunyai kapasitas kearifan keilmuan agama.

Kiai sebagai unsur penting dalam pesantren memberikan warna, corak dan faham sebuah pesantren. Pada proses sejarah pembangunan bangsa Indonesia, peran pesantren –baca kiai- turut mewarnai corak perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, disisi yang lain kiai juga turut mewarnai corak pemikiran santri-santrinya. Peran serta kiai sangat urgen untuk turut mendampingi pemerintah dalam

mensukseskan sosialisasi dan pengawasan program-program kebijakan pemerintah, jadi disatu sisi kiai mempunyai daya *reverse* terhadap pemerintah.

Pendidikan pesantren hingga kini berkembang menjadi lembaga pendidikan yang patut diperhitungkan di kancah dunia pendidikan di Indonesia. Banyak sudah para lulusan pesantren yang mampu berkiprah dan membangun Indonesia. Pendidikan pesantren yang selama ini dikenal dengan pengajaran sistem lama telah berkembang dalam sistem pengajarannya, karena dalam hal ini pesantren dituntut harus mampu bersaing dan berkompetisi dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Maka dalam perkembangan pesantren *salaf* kita sudah bisa menjumpai kombinasi dan *up-grade* dari sebuah bangunan sistem pengajaran yang menggabungkan berbagai disiplin keilmuan, tidak hanya berkonsentrasi pada satu fokus aspek sistem pengajaran.

Pesantren dalam membangun citranya sebagai pusat peradaban Islam tidak serta dengan mudah dapat tercapai apabila masing-masing unsur yang ada di pesantren sebagai unsur intrinsik dan masyarakat serta pemerintah sebagai unsur ekstrinsik berjalan sendiri-sendiri. Jika memang *idealita* umat untuk membangun pusat peradaban Islam maka diperlukan komitmen, *ghirah*, konsistensi serta sikap terbuka dari masing-masing pihak dalam memberikan alternatif pemikiran demi kemajuan pesantren. Sehingga nantinya pesantren bisa dijadikan model atau laboratorium pelatihan bagi calon intelektual-agamawan.



## Referensi

- Abullah, M. A. (2012). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif(III)*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ali, M. (1971). *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia*. (Y. Nida, Ed.). Yogyakarta.
- Bahwi, H. (2012). Peran intelektual pesantren indonesia dan. *Karsa*, 20(1).
- Dhofier, Z. (1994). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- Greertz, C. (1960). The Javanese Kyai: The Changing Role of a Cultur Broker. *Comparative Studies in Society and History*, 2.
- Hasan, M. (2015). INOVASI DAN MODERNISASI PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN. *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, 23(2), 295305. <http://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.728>
- Horikoshi, H. (1986). *Kiai dan Perubahan Sosial*. (U. Basalim & A. Muarly, Ed.). Jakarta: Penerbit P3M.
- Imron, A. (1993). *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng*. Malang: Kalimasahada.
- Ismail, F. (2004). *Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Analisa Historis*. (4, Ed.). Jakarta: Mitra Cendekia.
- Khuriyah, Zamroni, & Sumarno. (2016). Pengembangan Model Evaluasi Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20(1).
- Madjid, N. (1985). "Merumuskan Kembali Tujuan pendidikan Islam" dalam *Dawam Rahardjo*. (P. D. P. M. dari Bawah, Ed.). Jakarta: P3M.
- Mastuhu. (1997). *Kyai Tanpa Pesantren: K.H. Ali Yafie dalam Peta Kekuasaan Sosial Islam Indonesia*. (J. D & Rahman, Ed.). Bandung: Mizan.
- Maulani, A. (2016). PEMBARUAN DAN PERAN SOSIAL TRANSFORMATIF PESANTREN DAN ISLAM INDONESIA Achmad Maulani Pendahuluan. *Sosiologi Reflektif*, 10(April 2016), 159–184.
- Muhajir, N. (1984). *Teori Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasih.

- Nasir, R. (2005). *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal; Pondok Pesantren di Tengah Arus Peradaban*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Rahim, H. (2001). *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana.
- Rofieq, A. (2004). Profil Umum Beberapa Aspek Pendidikan Formal yang diselenggarakan Pesantren se-Karesidenan Malang. In *Mendongkrak Mutu Pendidikan*. Malang: FKIP Universitas Muhammadiyah Malang.
- Shodiq, M. (2011). Pesantren dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sosiologi Islam*, 1.
- Sholeh, M. N. (1997). *Pesantren dalam Konstelasi Perubahan Zaman*. (03, Ed.). Jakarta: L. Santri.
- Solichin, M. M. (2012). Kemandirian pesantren di era reformasi 1. *Nuansa*, 9(Kemandirian Pesantren), 191–192.
- Sumadi, K. (2012). Potret Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Salafiah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 3.
- Suwadji. (2014). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Pondok Pesantren. *Edukasi*, 2.
- Syam, N. (2005). *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIs.
- Syaodih, N. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wahid, A. (1987). *Kata Pengantar. Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M.
- Widjaja, I. W., & Swasono, M. F. (1983). *Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato II: dari tahun 1951 s.d. 1979*. Jakarta: Inti Idayu Press.